



LAPORAN KEUANGAN

TRIWULAN 3

ESELON 1

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAM**



UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Depok, 01 Desember 2020
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the QR code.

Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	IV
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 01 Desember 2020
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Triwulan III Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode yang berakhir per 30 September 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Triwulan III TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.427.955.852,- atau mencapai 168% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.849.625.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Triwulan III TA 2020 adalah sebesar Rp.95.460.074.691,- atau mencapai 41% dari alokasi anggaran sebesar Rp.231.347.990.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2019. Nilai Aset per 30 September 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.1.274.845.093.494,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.6.103.129.542,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.9.437.575,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.1.268.066.512.265,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.666.014.112,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.5.382.478.583,- dan Rp.1.269.462.614.911,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2020 adalah sebesar Rp.1.086.217.231,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.82.902.784.976,- sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.81.816.567.745,-. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.570.357.097,- dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. 81.246.146.648,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang berakhir per 30 September 2020 adalah sebesar Rp.1,230,994,765,415,- ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp.81.246.146.648,- kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan transaksi antar entitas senilai Rp.119.713.996.144,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 September 2020 adalah senilai Rp.1,269.462.614.911,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Triwulan III Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 SEPTEMBER 2020 DAN 30 SEPTEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TRW III TA 2020		% thd Angg	TRW III TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	849.625.000	1.427.955.852	168,07	2.213.964.148
JUMLAH PENDAPATAN		849.625.000	1.427.955.852	168,07	2.213.964.148
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	25.264.833.000	22.683.898.811	89,78	21.570.057.167
Belanja Barang	B.4	109.879.752.000	53.019.264.972	48,25	65.827.672.122
Belanja Modal	B.5	96.203.405.000	19.756.910.908	20,54	1.376.208.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		231.347.990.000	95.460.074.691	41,26	88.773.937.289

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
NERACA
PER 30 SEPTEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	5.375.532.383	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNPB	C.4	55.000.000	55.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(275.000)	(275.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	672.872.159	948.042.361
Jumlah Aset Lancar		6.103.129.542	1.002.767.361
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	9.485.000	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan	C.13	(47.425)	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		9.437.575	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.088.664.563.800	1.072.226.368.000
Tanah Belum Diregister		(210.295.800)	
Peralatan dan Mesin	C.15	62.442.737.010	52.360.266.470
Gedung dan Bangunan	C.16	157.982.322.218	149.797.879.335
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	9.395.644.993	9.395.644.993
Aset Tetap Lainnya	C.18	3.085.353.051	2.972.643.997
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	12.497.217.562	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(65.791.030.569)	(57.213.958.046)
Jumlah Aset Tetap		1.268.066.512.265	1.229.538.844.749
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	863.076.690	831.576.690
Aset Lain-Lain	C.22	11.500.405.790	11.500.405.790
Aset Lain-Lain Belum Diregister		210.295.800	
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(11.907.764.168)	(11.871.882.975)
Jumlah Aset Lainnya		666.014.112	460.099.505
JUMLAH ASET		1.274.845.093.494	1.231.001.711.615
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	5.375.532.383	-
Utang pada Pihak Ketiga	C.25	6.946.200	6.946.200
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.382.478.583	6.946.200
JUMLAH KEWAJIBAN		5.382.478.583	6.946.200
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	1.269.462.614.911	1.230.994.765.415
JUMLAH EKUITAS		1.269.462.614.911	1.230.994.765.415
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.274.845.093.494	1.231.001.711.615

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020
DAN 30 SEPTEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Sept 2020	30 Sept 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.086.217.231	2.209.188.351
JUMLAH PENDAPATAN		1.086.217.231	2.209.188.351
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	22.683.898.811	21.570.057.167
Beban Persediaan	D.3	1.012.021.863	781.326.685
Beban Barang dan Jasa	D.4	40.800.699.613	43.885.835.098
Beban Pemeliharaan	D.5	5.798.674.165	2.330.191.053
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6.084.264.809	18.487.973.447
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial	D.7	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.9	6.523.225.715	6.536.959.310
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		82.902.784.976	93.592.342.760
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(81.816.567.745)	(91.383.154.409)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		230.559.121	-
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya		339.861.976	213.746.191
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		570.421.097	213.746.191
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(81.246.146.648)	(91.169.408.218)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(81.246.146.648)	(91.169.408.218)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020
DAN 30 SEPTEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2020	30 September 2019
EKUITAS AWAL	E.1	1.230.994.765.415	961.490.164.380
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(81.246.146.648)	(91.169.408.218)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Ekuitas	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	119.713.996.144	413.875.976.950
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		38.467.849.496	322.706.568.732
EKUITAS AKHIR	E.5	1.269.462.614.911	1.284.196.733.112

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan ham dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang masyarakat, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), dan terbaru (*newer*).

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan masyarakat, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan,

pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan ham, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis substantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan ham yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevant*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”

Sasaran :

- Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135):

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Triwulan III Tahun 2020 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Imigrasi	1	-	-	-	1
3	12	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	1	-	-	-	1
4	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	-	1	-	-	1

5	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	1	-	-	1
6	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
Jumlah			3	3	-	-	6

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Lain-lain
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan

nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

• **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Triwulan III tahun anggaran 2020, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2020	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	849.625.000	849.625.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	849.625.000	849.625.000
Belanja		
Belanja Pegawai	9.323.865.000	26.700.170.000
Belanja Barang	65.380.736.000	99.293.944.000
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Modal	50.689.205.000	105.353.876.000
Jumlah Belanja	125.393.806.000	231.347.990.000

B.1 PENDAPATAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp.1.427.955.852,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 adalah sebesar Rp. 1,427.955.852,- atau mencapai 168.07% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.849.625.000,- Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 September 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penjualan, Pengelolaan BMN dan luran Badan Usaha	30.000.000	368.776.308	1.229,25
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	819.625.000	948.000.000	115,66
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Pengelolaan Rekening Perbankan		-	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	111.179.544	
Jumlah	849.625.000	1.427.955.852	168,07

Realisasi Pendapatan Triwulan III TA 2020 mengalami penurunan sebesar 35.50% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Triwulan III TA 2019. Hal ini disebabkan karena pengurangan kegiatan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan (PNBP) menjadi 1 angkatan.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 September TA 2020 dan 30 September TA 2019*

URAIAN	REALISASI 30 SEPT 2020	REALISASI 30 SEPT 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	368.776.308	36.688.351	9,95
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	948.000.000	2.172.500.000	229,17
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	-
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	111.179.544	4.775.797	2227,98
Jumlah	1.427.955.852	2.213.964.148	-35,50

B.2. BELANJA

*Realisasi
Belanja
Rp.95.460.074.691,-*

Realisasi Belanja pada 30 September 2020 adalah sebesar Rp.95.460.074.691,- atau 41.26% dari anggaran belanja sebesar Rp.231.347.990.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Triwulan III TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
Triwulan III TA 2020*

URAIAN	Triwulan III TA 2020		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	26.700.170.000	22.685.678.131	84,96
Belanja Barang	99.293.944.000	53.020.019.972	53,4
Belanja Modal	105.353.876.000	19.756.910.908	18,75
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	231.347.990.000	95.462.609.011	41,26
Pengembalian Belanja		(2.534.320)	-
Total Belanja	231.347.990.000	95.460.074.691	41,26

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Berdasarkan Program
Triwulan III TA 2020*

PROGRAM	Triwulan III TA 2020		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	819.625.000	948.000.000	115,66
Total Belanja	819.625.000	948.000.000	115,66

Dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2019, Realisasi Belanja pada Triwulan III TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 7.53%. Hal ini disebabkan penambahan anggaran belanja BPSDM Hukum dan HAM pada TA 2020 dibandingkan dengan TA 2019.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN	REALISASI TRW III TA 2020	REALISASI TRW III TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	22.685.678.131	21.570.057.167	5,17
Belanja Barang	53.020.019.972	65.827.672.122	(19,46)
Belanja Modal	19.756.910.908	1.376.208.000	1.335,61
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	95.462.609.011	88.773.937.289	7,53

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp.22.683.898.811,- Realisasi Belanja Pegawai Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.22.683.898.811,- dan Rp.21,570.057.167,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Triwulan III TA 2020 mengalami peningkatan sebesar 5.16% dari Triwulan III TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan pegawai yang mutasi menjadi JFT.

*Perbandingan Belanja Pegawai
Triwulan III 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN	REALISASI TRW III TA 2020	REALISASI TRW III TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	22.611.388.131	21.247.381.544	6,42
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	74.290.000	329.903.000	(77,48)
Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	22.685.678.131	21.577.284.544	5,14
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.779.320)	(7.227.377)	(75,38)
Jumlah Belanja	22.683.898.811	21.570.057.167	5,16

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp. 53.019.264.972,-

Realisasi Belanja Barang Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.53.019.264.972,- dan Rp.65.827.672.122,-.

Realisasi Belanja Barang Triwulan III TA 2020 mengalami penurunan sebesar 19.46% dari Triwulan III TA 2019. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan pagu anggaran Belanja Barang Triwulan III Tahun 2020 dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2019 dikarena terkendala waktu pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan di masa pandemik berubah/mundur dari jadwal sehingga dilakukan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.

*Perbandingan Belanja Barang
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III 2019*

URAIAN	REALISASI TRW III TA 2020	REALISASI TRW III TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	9.561.036.008	6.136.449.512	55,81
Belanja Barang Non Operasional	20.646.620.338	23.165.550.043	(10,87)
Belanja Persediaan	130.002.485	915.144.424	(85,79)
Belanja Jasa	10.422.559.067	14.583.835.543	(28,53)
Belanja Pemeliharaan	6.175.537.265	2.538.719.153	143,25
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.084.264.809	18.490.092.303	(67,09)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	6.527.200	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	53.020.019.972	65.836.318.178	(19,47)
Pengembalian Belanja	(755.000)	(8.646.056)	
Jumlah Belanja	53.019.264.972	65.827.672.122	(19,46)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp.19.756.910.908,-

Realisasi Belanja Modal Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.19.756.910.908,- dan Rp.1.376.208.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 1335.61% dibandingkan Triwulan III TA 2019 hal ini dikarenakan adanya pengadaan peralatan dan mesin dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan pengadaan inventaris kantor di masing-masing satker BPSDM Hukum dan HAM.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019

URAIAN	REALISASI TRW III TA. 2020	REALISASI TRW III TA. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.875.289.504	447.402.000	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.527.116.550	928.806.000	1248,73
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	354.504.854	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	19.756.910.908	1.376.208.000	1335,61
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	19.756.910.908	1.376.208.000	1335,61

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TRW III TA. 2020	REALISASI TRW III TA. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Triwulan III TA 2020 adalah sebesar Rp.6.875.289.504,-, mengalami kenaikan sebesar 1433.69% bila dibandingkan dengan Triwulan III TA 2019 sebesar Rp.447,402,000,-. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.5.088.991.950,-, Akademi Ilmu Imigrasi sebesar Rp.269.049.084,-, Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp.144.772.000,-, Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp.905.106.570,- dan Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp.420.399.100,-. Khusus pemasangan peralatan dan mesin di satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.46.970.000,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN	REALISASI TRW III TA. 2020	REALISASI TRW III TA. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.828.319.504	447.402.000	1426,22
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	46.970.000	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	6.875.289.504	447.402.000	1436,71
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	6.875.289.504	447.402.000	1436,71

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.12.527.116.550,- dan Rp.10,628,408,858,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	TRW III TA. 2020	TRW III TA. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.527.116.550	0	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	928.806.000	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	12.527.116.550	928.806.000	1248,73
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	12.527.116.550	928.806.000	1248,73

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	TRW III TA. 2020	TRW III TA. 2019	Naik (Turun)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.354.504.854,- dan Rp.0,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2020	TA. 2019	Naik (Turun) %
Belanja <i>Software</i>	144.209.054	-	#DIV/0!
Sewa Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	210.295.800	-	-
Jumlah Belanja Kotor	354.504.854	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	354.504.854	-	#DIV/0!

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja

Bantuan Sosial

Rp.0,-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2020	TA. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.5.375.532.383,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.5.375.532.383,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
30 September 2020 dan 31 Desember 2019*

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019
Rekening Bank	5.375.532.383	0
Uang Tunai	-	-
Jumlah	5.375.532.383	-

Kas berjalan sebesar Rp.5.375.532.383,- terdiri dari Uang Persediaan (UP) dan LS yang berada di Bendahara Pengeluaran Satker BPSDM Hukum dan HAM.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0,-

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Triwulan III TA 2020 dan TA 2019*

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp.0,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Piutang PNBP

Piutang PNBP
Rp.55.000.000,-

Saldo Piutang PNBP per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.55.000.000,- dan Rp.55.000.000,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP Triwulan III TA 2020 dan TA 2019

Uraian	TH 2020	TH 2019
Piutang PNBP	55.000.000	55.000.000
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	55.000.000	55.000.000

Piutang sebesar Rp.55.000.000,- merupakan piutang atas sewa-menyewa gedung ALTRI sekarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi yang masih belum dibayar

sampai dengan tanggal pelaporan dan sudah dilakukan penagihan.

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp.0,- Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Triwulan III TA 2020 dan TA 2019*

No	Nama	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		-	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp.0,- Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar Rp.275.000,- Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.275.000,- dan Rp.275.000,-.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
Triwulan III TA 2020*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak Lancar	55.000.000	0,50%	275.000
Jumlah	55.000.000		275.000

C.8 Beban Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp.0,-*

Saldo Beban Dibayar di Muka per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
Triwulan III TA 2020 dan TA 2019*

JENIS	TA. 2020	TA. 2019
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan		
Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp.0,-*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2020 dan 2019*

JENIS	TH 2020	TH 2019
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

Persediaan Rp.672.872.159,- Nilai Persediaan per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.672.872.159,- dan Rp.948.042.361,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Persediaan
per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019*

JENIS	TH 2020	TH 2019
Barang Konsumsi	515.882.359	832.702.203
Barang untuk Pemeliharaan	156.989.800	94.214.700
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	21.107.458
Jumlah	672.872.159	948.024.361

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Rp.0,- Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0,-

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Non
Lancar
Rp.0,-

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

Tanah
Rp.1.088.664.563.800,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.088.454.268.000,- dan Rp.1.072.226.368.000,-. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	Rp 1.072.226.368.000
Mutasi tambah:	Rp 16.227.900.000
Pembelian	Rp -
Hibah	Rp -
Transfer	Rp 16.227.900.000
Revaluasi Aset	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Revaluasi Aset	Rp -
Penghapusan	Rp -
Saldo per 30 September 2020	Rp 1.088.454.268.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2020	Rp -
Nilai Buku per 30 September 2020	Rp 1.088.454.268.000

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m² terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m² terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ihksan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Asset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Pungur – Pantai Timur Kabil Batam.

C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin*
Rp.62.442.737.010,-

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.62.442.737.010,- dan Rp.52.360.266.470,- Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	Rp 52.360.266.470
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp -
Hibah	Rp -
Transfer Masuk	Rp 10.082.470.540
Koreksi Tambah	Rp -
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	Rp -
Penghapusan	Rp -
Saldo per 30 September 2020	Rp 62.442.737.010
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2020	Rp (44.395.335.558)
Nilai Buku per 30 September 2020	Rp 18.047.401.452

- Mutasi bertambah pada Satker BPSDM Hukum dan HAM didapat dari belanja modal, transfer masuk dari Ditjen Administrasi Hukum dan Umum dan dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal.

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp.157.982.322.218,
-

Saldo gedung dan bangunan per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.157.982.322.218,- dan Rp.149.797.879.335,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	149.797.879.335
Mutasi tambah:	8.184.442.883
Transfer Masuk ATR	8.184.442.883
Penambahan Nilai Gedung	-
Revaluasi Aset	-
Hibah	-
Reklas Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi Gd dan Bangunan	-
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 30 September 2020	157.982.322.218
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2020	(17.248.485.533)
Nilai Buku per 30 September 2020	140.733.836.685

- Terdapat Nilai mutasi tambah didapat dari transfer masuk bangunan ibadah permanen dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebesar Rp. 8.184.442.883,-.

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.9.395.644.993,-

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.9.395.644.993,- dan Rp.9.395.644.993,-

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	9.395.644.993
Mutasi tambah:	
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	
Revaluasi Aset	-
Saldo per 30 September 2020	9.395.644.993
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2020	(2.609.709.478)
Nilai Buku per 30 September 2020	6.785.935.515

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp.3.085.353.051,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.3.085.353.051,- dan Rp.2.972.643.997,-.

Saldo per 31 Desember 2019	2.972.643.997
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	112.709.054
Mutasi kurang:	
Penyelesaian Pembangunan	-
Saldo per 30 Juni 2020	3.085.353.051
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2020	(1.537.500.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2020	1.547.853.051

- Gedung dan bangunan belum diregister sebesar Rp 112.709.054,- berdasarkan neraca percobaan diketahui bahwa gedung dan bangunan yang dimaksud merupakan aset tetap renovasi milik Balai Diklat Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah untuk renovasi interior dan pemasangan sekat.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.12.497.217.562,-*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.12.497.3217.562,- dan Rp.0,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

- Konstruksi Dalam Pengerjaan milik satker BPSDM Hukum dan HAM untuk pembangunan ruang kelas, kantor, auditorium dan asrama senilai Rp.1,844,272,204,-.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan satker BPSDM Hukum dan HAM pembangunan di Politeknik Tangerang berupa ruang kelas dan lahan parkir di Gandul senilai Rp.24.536.500,-.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah untuk pembangunan ruang kelas, kantor, auditorium dan asrama senilai Rp.10.628.408.858,-.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.65.791.030.569,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.65.791.030.569,- dan Rp.57.213.958.046,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020,

sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	62.442.737.010	44.395.335.558	18.047.401.452
2	Gedung dan Bangunan	157.982.322.218	17.248.485.533	140.733.836.685
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.395.644.993	2.609.709.478	6.785.935.515
4	Aset Tetap Lainnya	3.085.353.051	1.537.500.000	1.547.853.051
Total		232.906.057.272	65.791.030.569	167.115.026.703

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp.863.076.690,-

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.863.076.690,- dan Rp.831.576.690,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud
Triwulan III TA 2020

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 812.483.190
2	ATB Lainnya	Rp 50.593.500
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2019		Rp 863.076.690

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp 831.576.690
Mutasi tambah:	
pembelian	Rp 31.500.000
Transfer Masuk	Rp -
Saldo per 30 September 2020	Rp 863.076.690
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2020	Rp 706.576.940
Nilai Buku per 30 September 2020	156.499.750

Aset Tetap Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 31.500.000,- pada Satker Badiklat Jawa Tengah masuk dalam catatan pembelian Software atau Aset Tetap Tak Berwujud untuk aplikasi Badiklat e-learning center.

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp.11.500.405.790,-

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.11.500.405.790,- dan Rp.11.500.405.790,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	11.500.405.790
Mutasi tambah:	
Penghentian Aset dr penggunaan	-
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN	-
Saldo per 30 September 2020	11.500.405.790
Akumulasi Penyusutan	69.259.054
Nilai Buku per 30 September 202	11.569.664.844

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.11.907.764.168,-

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.11.907.764.168,- dan Rp.11.871.882.975,- Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	812.483.190	729.061.315	83.421.875
2	ATB Lainnya	50.593.500	-	50.593.500
	Jumlah	863.076.690	729.061.315	134.015.375
B	Aset Lainnya	11.500.405.790	11.178.702.853	321.702.937
	Jumlah	11.500.405.790	11.178.702.853	321.702.937
	Total	12.363.482.480	11.907.764.168	455.718.312

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN
Rp.5.375.532.383,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.5.375.532.383,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.6.946.200,-

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.6.946.200,- dan Rp.0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa uang makan bulan November dan Desember pada Balai Diklat Sulawesi Utara dan segera akan ditindaklanjuti. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 6.946.200
2	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
3	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp -
Total		Rp 6.946.200

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp.0,-

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Rincian Pendapatan

Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Triwulan III TA 2020

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	Rp -	
Instansi Pemerintah Lainnya	Rp -	
Badan Lainnya	Rp -	
Total	Rp -	

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

*eban yang
Masih harus
Dibayar
Rp.0,-*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Triwulan III TA 2020 dan TA 2019

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah	-	-

C.28 Ekuitas

*Ekuitas
Rp.1.296.462.614.911,-*

Ekuitas per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.269.462.614.911,- dan Rp.1.230.994.765.415,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebesar Rp.1.086.217.231,- dan Rp.2.209.188.351,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.22.683.898.811,- dan Rp.21.570.057.167,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	22.609.608.811	21.240.154.167	6
Beban Lembur	74.290.000	329.903.000	(77)
Beban Tunj. Khusus & Blj. Pegawai Transit	-	-	-
Jumlah	22.683.898.811	21.570.057.167	5

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.012.021.863,- dan Rp.781.326.685,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebagai

berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
TA 2020 dan TA 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TRW III TH 2020	TRW III TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.012.021.863	707.632.421	43,02
Beban Persediaan pita cukai, materau, dan leges	0	0	-
Beban Persediaan Bahan Baku	0	10.063.000	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	-	63.501.264	(100,00)
Jumlah Beban Persediaan	1.012.021.863	781.196.685	29,55

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa
Rp.40.800.699.613,-*

Beban Barang dan jasa pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.40.800.699.613,- dan Rp.43.885.835.098,-.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN	TH 2020	TH 2019	% Naik (TURUN)
Beban Barang Operasional	7.855.705.060	6.136.449.512	28
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.717.461.848		-
Beban Barang Non Operasional	20.625.189.947	23.165.550.043	(11)
Beban Bahan Non Operasional - Penanganan Pandemi	4.740.891		
Beban Langganan Daya dan Jasa	1.680.839.001	2.101.018.539	(20)
Beban Sewa	3.341.850.066	4.983.472.004	(33)
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Jasa Profesi	5.390.770.000	6.625.645.000	(19)
Beban Jasa Lainnya	5.650.000	873.700.000	(99)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.450.000		
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	175.042.800	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	40.800.699.613	43.885.835.098	(7)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp.5.798.674.165,- Beban pemeliharaan pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.5.798.674.165,- dan Rp.2.330.191.053,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN	TRW III TH 2020	TRW III TH 2019	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.232.579.428	512.164.933	726
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	49.275.000		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.254.553.737	1.695.542.620	(26)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-	
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	262.266.000	111.863.500	134
Beban Persediaan Suku Cadang	-	10.620.000	
Jumlah	5.798.674.165	2.330.191.053	149

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp.6.084.264.809,- Beban Perjalanan Dinas pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.6.084.264.809,- dan Rp.18.487.973.447,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TRW III TH 2020	TRW III TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	5.612.060.839	15.980.975.267	-64,88
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	417.780.000	573.884.980	-27,20
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.250.000	506.350.000	-98,57
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	47.173.970	1.420.236.000	-96,68
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	6.527.200	0,00
Jumlah	6.084.264.809	18.487.973.447	-67,09

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TRW III TH 2020	TRW III TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Bantuan
Sosial
Rp.0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN	TRW III TH 2020	TRW III TH 2019	% Naik (TURUN)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.6.523.225.715,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.6.523.225.715,- dan Rp.6.536.959.310,-.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TRW III TH 2020	TRW III TH 2019	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.085.249.937	2.382.919.750	29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.961.478.663	3.827.173.278	(23)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	440.615.922	290.518.839	52
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	4.153.750	(100)
Jumlah Penyusutan	6.487.344.522	6.504.765.617	(0)
Beban Amortisasi Aplikasi	-	-	-
Beban Amortisasi Software	22.484.375	18.796.875	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah Amortisasi	22.484.375	18.796.875	20
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yg Tdk Digunakan	13.396.818	13.396.818	-
Jumlah	6.523.225.715	6.536.959.310	(0)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
tertanggih
Rp.0,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertanggihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TRW III TH 2020	TRW III TH 2019	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.22.734.721.-

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019

URAIAN	TRW III TH 2020	TRW III TH 2019	NAIK (TURUN) %
Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	362.767.276	505.810.547	-28,28
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	22.905.300	292.064.356	-92,16
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	339.861.976	213.746.191	59,00

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2019.*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya didapat dari:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) sebesar Rp.186.295,-, terdiri dari :
 - a. Akademi Ilmu Pemasarakatan Rp.1.295,-
 - b. Balai Diklat Jawa Tengah Rp.185.000,-
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) sebesar Rp.21.050.000,- dari satker Akademi Ilmu Imigrasi.
3. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (491511) sebesar Rp.5.833.026,-, terdiri dari :
 - a. BPSDM Hukum dan HAM Rp.4.677.076,-
 - b. Akademi Ilmu Pemasarakatan Rp.828.800,-
 - c. Balai Diklat Kepulauan Riau Rp.139.500,-

- d. Balai Diklat Jawa Tengah Rp.131.250,-
- e. Balai Diklat Sulawesi Utara Rp.56.400,-

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (593311) didapat dari :

- BPSDM Hukum dan HAM Rp.2.357.700,-
- Akademi Ilmu Pemasarakatan Rp.1.641.500,-
- Balai Diklat Kepulauan Riau Rp.217.500,-
- Balai Diklat Sulawesi Utara Rp. 117.900,-

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Pos-Pos Luar Biasa
Rp.0,-

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa
Triwulan III TA 2020 dan Triwulan III TA 2019*

URAIAN	TRW III TH 2020	TRW III TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Defisit Pos Luar Biasa	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.1.230.994.765.415,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.230.994.765.415,- dan Rp.961,490,164,38,-.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
Rp.81.246.146.648,-

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah defisit sebesar Rp.81.246.146.648,- dan Rp.91.169.408.218,-. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Rp.0,-

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 sebesar Rp.0,-.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,-

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.119.713.996.144,- dan Rp.413.875.976.950,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.427.955.852)
Ditagihkan ke Entitas Lain	95.460.074.691
Transfer Masuk	25.681.877.305
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	119.713.996.144

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2020, DDEL sebesar Rp.(1.427.955.852),- sedangkan DKEL sebesar Rp.95.4600074.691,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.25.681.877.305,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.0,-

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2020 adalah Rp.0,-

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.1.269.462.614.911,-

Nilai ekuitas pada 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.269.462.614.911,- dan Rp.1.284.196.733.112,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Terdapat Jurnal Tidak Lazim pada satker BPSDM Hukum dan HAM tercatat pada Jurnal Penyesuaian sebagai asset ekstakomtabel karena harga satuan pembelian barang kurang dari Rp.1.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. BPSDM Hukum dan HAM terdapat Jurnal Tidak Lazim dengan Nominal sebagai berikut :
 - Rp.990.000,- digunakan untuk pembelian teko listrik harga Rp.495.000,- sebanyak 2 unit;
 - Rp.95.562.500,- digunakan untuk pembelian Kursi Besi seharga Rp.468.000,- sebanyak 200 unit;
 - Rp.30.690.000,- untuk pembelian Voice Record sebanyak 30 unit seharga Rp.990.000,- total Rp.29.700.000,- dan pembelian teko listrik harga Rp.495.000,- sebanyak 2 unit total Rp.990.000,-
 - b. Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp.10.880.000,- digunakan untuk pembelian Kursi besi, HT, Standing mic, mic, Microphone standing mic, dll.
 - c. Balai Diklat Jawa Tengah dengan Nominal sebagai berikut:
 - Rp.1.160.300,- untuk pembelian Hiasan Bunga/Daun Imitasi, Pot Bunga dan Tongkat Alumunium;
 - Rp.1.760.000,- untuk pembelian Kitchen Set dan Lemari Pendek.
 - d. Jurnal Tidak Lazim Balai Diklat Sulawesi Utara dengan Nominal sebagai berikut:
 - Terdapat akun untuk belanja operasional penanganan covid -19 masuk dalam sebesar Rp.6.901.400,-,
 - Sebesar Rp.34.000.000,- diperuntukkan untuk pembelian White board, Kursi Besi dan Unit Power Supply.

2. Laporan Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Terdapat realisasi pada Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.51.299.000,- yaitu berupa hasil lelang kendaraan dinas berupa mobil dan motor milik satker Ilmu Imigrasi.
 - Realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.50.762.334,- yaitu pelaksanaan lelang inventaris kantor berupa meja kerja kayu, lemari besi, kursi besi dll dan satker Akademi Imigrasi sebesar Rp.128.497.787,-.
 - Realisasi Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp35.986.792,-, satker Akademi Imigrasi sebesar Rp.1.806.873,- dan satker Akademi Ilmu Pemasaryakatan sebesar Rp.100.423.522,-.
 - Realisasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.948.000.000,- untuk pelaksanaan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan. Untuk Pagu Kegiatan terjadi kesalahan penghitungan dalam penganggaran.
 - Adanya Realisasi Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp.911.619,- tanpa Estimasi Anggaran dikarenakan pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan, pembulatan tunjangan, tunjangan Jabatan Fungsional Umum dan tunjangan Struktural, dengan rincian sebagai berikut :
 - Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.911.619,-
 - Satker Akademi Ilmu Pemasaryakatan sebesar Rp.1.295,-,
 - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp.185.000,.
 - Adanya Realisasi Pendapatan Penerimaan Kembali

Belanja Barang TAYL sebesar Rp.110.267.881,- tanpa Estimasi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.89.217.881,- pengembalian honor pendamping sikap dan perilaku dasar (latsar) CPNS Gol. II dan III Tahun 2019,
- Satker Akademi Imigrasi sebesar Rp.21.050.000,-,
- Realisasi Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp.44,- pada satker Akademi Imigrasi.

3. Realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya milik satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.50,762,334,- yang tidak masuk dalam estimasi pendapatan, yaitu Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:

- 1) Tanah,
- 2) Gedung dan bangunan, dan
- 3) Jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:
 - a) Jalan dan jembatan, dan
 - b) Bangunan air

Estimasi pendapatan penerimaan negara bukan pajak (sewa BMN) belum berubah pada saat Triowulan III dikarenakan pada saat penginputan estimasi hasil perhitungan dari KPKNL belum keluar/terbit.

4. Terdapat Tanah yang belum diregister sebesar Rp.210.295.800,- pada Badiklat Kepulauan Riau yang merupakan salah akun dan sudah diajukan ralat akun ke KKPN.

5. Piutang Jangka Panjang berupa Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada satker Akademi Ilmu Imigrasi karena kehilangan laptop senilai Rp.9.485.000,- yang rencananya akan dicicil selesai tahun anggaran 2020.

6. Masih terdapat pagu minus pada akun belanja pegawai pada satker Balai Diklat Kepulauan Riau dan Balai Diklat Sulawesi Utara yang saat ini sudah melakukan optimalisasi. Sedangkan untuk satker lainnya yaitu BPSDM Hukum dan HAM, Akademi Ilmu Pemasaryakatan dan Akademi Imigrasi penambahan anggarannya sudah dalam proses pengajuan ke Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Hukum dan HAM.
7. Pagu Minus pada akun Belanja Non Operasional Lainnya (521119) pada satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp.32.564.050,- dikarenakan penginputan dalam satu akun tetapi pencatatan dalam kegiatan yang berbeda yaitu Kegiatan Penunjang sarana dan prasarana kegiatan perkantoran dan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Seragam, sehingga menimbulkan pagu minus dan saat ini dalam tahap revisi POK.
8. Aset Tetap pada POLTEKIP berupa tanah seluas 2.559m² dan bangunan seluas 2.425m² berlokasi di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kampus STIH Litigasi yang saat ini dalam proses penagihan uang sewanya (Surat penagihan BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM.I-PW.01-16 tanggal 30 Oktober 2019). Berdasarkan SEK-53.PB.04.02 tanggal 2 April Tahun 2020 telah dilakukan pembayaran ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dengan Nomor NTPN 534007QLTJRLB12 tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Untuk Biaya Piutang tak tertagih masih dalam upaya penagihan dari pihak Politeknik Ilmu Pemasaryakatan ke Pihak STIH Litigasi.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- I. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pos-pos dalam laporan keuangan antara lain :
 - a. Penyesuaian anggaran dan Penambahan Output dalam

kegiatan pada masa pandemik.

- b. Perubahan Pelatihan teknis metode klasikal menjadi Metode *E-Learning* dan Pelatihan Jarak Jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang ditimbulkan Covid-19
- c. Adanya tambahan anggaran belanja untuk pemeliharaan gedung dan bangunan khusus untuk masa pandemic.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	SMT I TA 2020		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
52	BELANJA BARANG			
5211	Belanja Barang Operasional			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	2.594.534.000	1.710.560.448	65,93
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2.594.534.000	1.710.560.448	65,93
5212	Belanja Barang Non Operasional			
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	262.325.000	7.240.891	100,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	262.325.000	7.240.891	100,00
5231	Belanja Pemeliharaan			
521134	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi	50.000.000	49.275.000	98,55
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	50.000.000	49.275.000	98,55
	JUMLAH BELANJA	2.906.859.000	1.767.076.339	60,79

- Realisasi Belanja barang operasional – penanganan Pandemi (521131) Rp.1.710.560.448,-, terdiri dari :
Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.1.605.424.728,-, Satker Akademi Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.91.701.220,- dan Satker Badiklat Kepulauan Riau Rp.13.434.500,-.
- Realisasi Belanja barang non operasional – penanganan Pandemi (521241) Rp. 7.240.891,-, berasal dari Satker BPSDM Hukum dan HAM.
- Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – penanganan Pandemi (521134) Rp.49.275.000,-,

berasal dari Satker BPSDM Hukum dan HAM.

- III. Satker yang sudah mengajukan penyesuaian anggaran dan sudah ada realisasinya pada Triwulan III Tahun Anggaran 2020 yaitu dari satker BPSDM Hukum dan HAM dan Akademi Ilmu Pemasarakatan, sedangkan untuk satker lainnya seperti Akademi Imigrasi, Balai Diklat Kepulauan Riau, Balai Diklat Jawa Tengah dan Balai Diklat Sulawesi Utara masih dalam proses revisi anggaran.
- IV. Pengajuan Perubahan Semula Menjadi terhadap pandemic Covid-19 satker BPSDM Hukum dan HAM dilampirkan pada data (terlampir).

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER SEPTEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 30/10/2020 11:55 PM
lap_neraca_es1_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	5,375,532,383	0	5,375,532,383	0.00
Piutang Bukan Pajak	55,000,000	55,000,000	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(275,000)	(275,000)	0	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	54,725,000	54,725,000	0	0.00
Persediaan	672,872,159	948,042,361	(275,170,202)	(29.03)
Persediaan yang Belum Diregister	(500)	0	(500)	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	6,103,129,042	1,002,767,361	5,100,361,681	508.63
ASET TETAP				
Tanah	1,088,664,563,800	1,072,226,368,000	16,438,195,800	1.53
Peralatan dan Mesin	62,442,737,010	52,360,266,470	10,082,470,540	19.26
Gedung dan Bangunan	157,982,322,218	149,797,879,335	8,184,442,883	5.46
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,395,644,993	9,395,644,993	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,085,353,051	2,972,643,997	112,709,054	3.79
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12,497,217,562	0	12,497,217,562	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(65,791,030,569)	(57,213,958,046)	(8,577,072,523)	14.99
JUMLAH ASET TETAP	1,268,276,808,065	1,229,538,844,749	38,737,963,316	3.15
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	9,485,000	0	9,485,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(47,425)	0	(47,425)	0.00
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	9,437,575	0	9,437,575	0.00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	9,437,575	0	9,437,575	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	863,076,690	831,576,690	31,500,000	3.79
Aset Lain-lain	11,500,405,790	11,500,405,790	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(11,907,764,168)	(11,871,882,975)	(35,881,193)	0.30
JUMLAH ASET LAINNYA	455,718,312	460,099,505	(4,381,193)	(0.95)
JUMLAH ASET	1,274,845,092,994	1,231,001,711,615	43,843,381,379	3.56
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	6,946,200	6,946,200	0	0.00
Uang Muka dari KPPN	5,375,532,383	0	5,375,532,383	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,382,478,583	6,946,200	5,375,532,383	77,388.10
JUMLAH KEWAJIBAN	5,382,478,583	6,946,200	5,375,532,383	77,388.10
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,269,462,614,411	1,230,994,765,415	38,467,848,996	3.12
JUMLAH EKUITAS	1,269,462,614,411	1,230,994,765,415	38,467,848,996	3.12
JUMLAH EKUITAS	1,269,462,614,411	1,230,994,765,415	38,467,848,996	3.12

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER SEPTEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 30/10/2020 11:55 PM
lap_neraca_es1_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,274,845,092,994	1,231,001,711,615	43,843,381,379	3.56

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER SEPTEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 30/10/2020 11:55 PM
lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	135,887,915,309	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	578,330,852	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	30,000,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan Yang Dialokasikan	819,625,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	16,678,340,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	341,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,187,978,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	316,640,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	905,780,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,153,880,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	227,739,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	938,627,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	4,045,767,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,007,350,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	237,728,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	9,581,223,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	39,796,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	1,001,415,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	1,632,866,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,594,534,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	18,257,300,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,895,850,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	19,402,216,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	262,325,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	807,983,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	14,000,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	1,968,660,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	79,125,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	7,200,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,576,764,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	4,583,881,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	12,528,680,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	291,914,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	16,000,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	7,037,887,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,265,403,000
2.0	523114	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	50,000,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,518,780,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER SEPTEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 30/10/2020 11:55 PM
lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	10,310,602,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,062,610,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	309,650,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	197,280,000
2.0	531115	Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	375,785,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	15,907,458,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	46,970,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	87,638,977,000
2.0	533115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0
2.0	534131	Allotment Belanja Modal Jaringan	0	48,272,000
2.0	534161	Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	1,115,677,000
2.0	536113	Allotment Belanja Modal Sewa Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	220,737,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	51,299,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	179,260,121
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	138,217,187
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	948,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	911,619
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	110,267,881
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	44
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	15,797,089,840	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	235,561	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,470
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,049,028,776	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	278,922,982	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	732,980,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,177,485,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	88,250,652	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	689,291,320	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,353,324,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	667,850
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	444,780,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,110,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	74,290,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,244,550,482	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,639,700	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	632,720,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	967,677,878	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER SEPTEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 30/10/2020 11:55 PM
lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,710,560,448	0
3.0	521211	Belanja Bahan	7,593,356,037	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	75,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,172,870,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	680,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11,840,633,300	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	14,142,791	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	131,305,585	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,365,608,883	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	20,973,053	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	968,750	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	293,288,315	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,353,850,066	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	5,390,770,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	5,650,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3,450,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,232,579,428	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	639,129,100	0
3.0	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	49,275,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,259,496,347	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	5,613,320,839	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	417,780,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,250,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	47,173,970	0
3.0	531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	210,295,800	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,828,319,504	0
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	46,970,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12,527,116,550	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	144,209,054	0
JUMLAH			232,778,480,172	232,778,480,172

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER SEPTEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 30/10/2020 11:55 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	718,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	4,657,532,383	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	55,000,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	275,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	515,882,359	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	156,989,800	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	0	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	500
0.0	131111	Tanah	1,088,664,563,800	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	62,442,737,010	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	157,982,322,218	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	112,709,054	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	12,497,217,562	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	44,395,335,558
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	17,248,485,533
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,699,810,354
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	59,426,574
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	850,472,550
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	9,485,000	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	47,425
0.0	162151	Software	812,483,190	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	50,593,500	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	11,500,405,790	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	11,178,702,853
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	729,061,315
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	6,946,200
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	5,375,532,383
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	95,460,074,691
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,427,955,852	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	25,681,877,305
0.0	391111	Ekuitas	0	1,230,994,765,415
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	51,299,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	179,260,121

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER SEPTEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 30/10/2020 11:55 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	138,217,187
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	948,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	911,619
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	110,267,881
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	44
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	251,587,776
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	15,797,089,840	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	235,561	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1,470
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,049,028,776	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	278,922,982	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	732,980,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,177,485,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	88,250,652	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	689,291,320	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,353,324,000	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	667,850
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	444,780,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	1,110,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	74,290,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	6,244,550,482	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,639,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	632,720,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	967,677,878	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,710,560,448	0
3.0	521211	Beban Bahan	7,593,356,037	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	75,000
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,172,870,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	680,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	11,840,633,300	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10,942,791	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,365,608,883	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	20,973,053	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	968,750	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	293,288,315	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,353,850,066	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	5,390,770,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	5,650,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3,450,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,232,579,428	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER SEPTEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 30/10/2020 11:55 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	49,275,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,259,496,347	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	5,613,320,839	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	417,780,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,250,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	47,173,970	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,085,249,937	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,961,478,663	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	425,633,368	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	9,904,429	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,078,125	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	22,484,375	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	13,396,818	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,012,021,863	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	262,266,000	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	22,905,300	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	175,742,800	0
JUMLAH			1,436,900,391,604	1,436,900,391,604

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2020 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
 UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI

Tgl. Cetak 30/10/2020

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	55,000,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	275,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	832,720,203	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	94,214,700	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	21,107,458	0
0.0	131111	Tanah	1,072,226,368,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	52,360,266,470	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	149,797,879,335	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	39,301,903,059
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	14,205,461,431
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,274,176,986
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	49,522,145
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	845,394,425
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	780,983,190	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	50,593,500	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	11,500,405,790	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	11,165,306,035
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	706,576,940
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	6,946,200
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,230,994,765,415
JUMLAH			1,300,087,827,636	1,300,087,827,636

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.F.W.1
 Tanggal : 30/10/20 11:56 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_face_es1_komparatif--

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	849,625,000	1,427,955,852	(578,330,852)	168	2,479,000,000	2,213,964,148	265,035,852	89
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	849,625,000	1,427,955,852	(578,330,852)	168	2,479,000,000	2,213,964,148	265,035,852	89
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	26,700,170,000	22,683,898,811	4,016,271,189	85	22,828,823,000	21,570,057,167	1,258,765,833	94
	BELANJA BARANG	99,293,944,000	53,019,264,972	46,274,679,028	53	100,984,784,000	65,827,672,122	35,157,111,878	65
	BELANJA MODAL	105,353,876,000	19,756,910,908	85,596,965,092	19	1,524,721,000	1,376,208,000	148,513,000	90
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	231,347,990,000	95,460,074,691	135,887,915,309	41	125,338,328,000	88,773,937,289	36,564,390,711	71
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 30/10/20 11:57
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	51,299,000	0	51,299,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	179,260,121	0	179,260,121	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30,000,000	138,217,187	0	138,217,187	460.72
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	30,000,000	368,776,308	0	368,776,308	1,229.25
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	819,625,000	948,000,000	0	948,000,000	115.66
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	819,625,000	948,000,000	0	948,000,000	115.66
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	911,619	0	911,619	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	110,267,881	0	110,267,881	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	44	0	44	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	111,179,544	0	111,179,544	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	849,625,000	1,427,955,852	0	1,427,955,852	168.07
	JUMLAH PENDAPATAN	849,625,000	1,427,955,852	0	1,427,955,852	168.07

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 30/10/20 11:57
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,725,576,000	16,678,340,000	15,797,089,840	0	15,797,089,840	94.72	881,250,160
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	145,000	341,000	235,561	1,470	234,091	68.65	106,909
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	363,203,000	1,187,978,000	1,049,028,776	0	1,049,028,776	88.3	138,949,224
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	105,785,000	316,640,000	278,922,982	0	278,922,982	88.09	37,717,018
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	189,301,000	905,780,000	732,980,000	0	732,980,000	80.92	172,800,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	443,580,000	1,153,880,000	1,177,485,000	0	1,177,485,000	102.05	(23,605,000)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	52,420,000	227,739,000	88,250,652	0	88,250,652	38.75	139,488,348
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	340,655,000	938,627,000	689,291,320	0	689,291,320	73.44	249,335,680
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,712,388,000	4,045,767,000	2,353,324,000	667,850	2,352,656,150	58.15	1,693,110,850
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	390,812,000	1,007,350,000	444,780,000	1,110,000	443,670,000	44.04	563,680,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	9,323,865,000	26,462,442,000	22,611,388,131	1,779,320	22,609,608,811	85.45	3,852,833,189
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	0	237,728,000	74,290,000	0	74,290,000	31.25	163,438,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	0	237,728,000	74,290,000	0	74,290,000	31.25	163,438,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	9,323,865,000	26,700,170,000	22,685,678,131	1,779,320	22,683,898,811	84.96	4016271189
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,327,917,000	9,581,223,000	6,244,550,482	0	6,244,550,482	65.17	3,336,672,518
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,996,000	39,796,000	11,639,700	0	11,639,700	29.25	28,156,300
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	625,680,000	1,001,415,000	632,720,000	0	632,720,000	63.18	368,695,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	311,156,000	1,632,866,000	967,677,878	0	967,677,878	59.26	665,188,122
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	2,594,534,000	1,710,560,448	0	1,710,560,448	65.93	883,973,552
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,283,749,000	14,849,834,000	9,567,148,508	0	9,567,148,508	64.43	5,282,685,492
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	21,893,402,000	18,257,300,000	7,593,356,037	75,000	7,593,281,037	41.59	10,664,018,963
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	523,165,000	1,895,850,000	1,172,870,000	680,000	1,172,190,000	61.83	723,660,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18,759,355,000	19,402,216,000	11,840,633,300	0	11,840,633,300	61.03	7,561,582,700
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	0	262,325,000	14,142,791	0	14,142,791	5.39	248,182,209
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	41,175,922,000	39,817,691,000	20,621,002,128	755,000	20,620,247,128	51.79	19,197,443,872
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	214,254,000	807,983,000	131,305,585	0	131,305,585	16.25	676,677,415
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	0	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	214,254,000	821,983,000	131,305,585	0	131,305,585	15.97	690,677,415
5221	Belanja Jasa							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 30/10/20 11:57
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
522111	Belanja Langganan Listrik	108,660,000	1,968,660,000	1,365,608,883	0	1,365,608,883	69.37	603,051,117
522112	Belanja Langganan Telepon	29,400,000	79,125,000	20,973,053	0	20,973,053	26.51	58,151,947
522113	Belanja Langganan Air	7,200,000	7,200,000	968,750	0	968,750	13.45	6,231,250
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	227,274,000	1,576,764,000	293,288,315	0	293,288,315	18.6	1,283,475,685
522141	Belanja Sewa	3,668,960,000	4,583,881,000	3,353,850,066	0	3,353,850,066	73.17	1,230,030,934
522151	Belanja Jasa Profesi	8,126,980,000	12,528,680,000	5,390,770,000	0	5,390,770,000	43.03	7,137,910,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	321,414,000	291,914,000	5,650,000	0	5,650,000	1.94	286,264,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	16,000,000	3,450,000	0	3,450,000	21.56	12,550,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,489,888,000	21,052,224,000	10,434,559,067	0	10,434,559,067	49.57	10,617,664,933
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	89,800,000	7,037,887,000	4,232,579,428	0	4,232,579,428	60.14	2,805,307,572
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	18,000,000	1,265,403,000	639,129,100	0	639,129,100	50.51	626,273,900
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -	0	50,000,000	49,275,000	0	49,275,000	98.55	725,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	991,856,000	2,518,780,000	1,259,496,347	0	1,259,496,347	50	1,259,283,653
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,099,656,000	10,872,070,000	6,180,479,875	0	6,180,479,875	56.85	4,691,590,125
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	6,778,317,000	10,310,602,000	5,613,320,839	0	5,613,320,839	54.44	4,697,281,161
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	177,450,000	1,062,610,000	417,780,000	0	417,780,000	39.32	644,830,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	161,500,000	309,650,000	7,250,000	0	7,250,000	2.34	302,400,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	197,280,000	47,173,970	0	47,173,970	23.91	150,106,030
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	7,117,267,000	11,880,142,000	6,085,524,809	0	6,085,524,809	51.22	5,794,617,191
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	65,380,736,000	99,293,944,000	53,020,019,972	755,000	53,019,264,972	53.4	46274679028
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	0	210,295,800	0	210,295,800	0	(210,295,800)
531115	Belanja Modal Pengurusan dan Pematangan Tanah	641,750,000	375,785,000	0	0	0	0	375,785,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	641,750,000	375,785,000	210,295,800	0	210,295,800	55.96	165,489,200
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,471,609,000	15,907,458,000	6,828,319,504	0	6,828,319,504	42.93	9,079,138,496
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	46,970,000	46,970,000	0	46,970,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,471,609,000	15,954,428,000	6,875,289,504	0	6,875,289,504	43.09	9,079,138,496
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47,062,475,000	87,638,977,000	12,527,116,550	0	12,527,116,550	14.29	75,111,860,450
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	292,634,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	47,355,109,000	87,638,977,000	12,527,116,550	0	12,527,116,550	14.29	75,111,860,450

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 30/10/20 11:57
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534131	Belanja Modal Jaringan	0	48,272,000	0	0	0	0	48,272,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	48,272,000	0	0	0	0	48,272,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	1,115,677,000	144,209,054	0	144,209,054	12.93	971,467,946
536113	Belanja Modal Sewa Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	220,737,000	220,737,000	0	0	0	0	220,737,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	220,737,000	1,336,414,000	144,209,054	0	144,209,054	10.79	1,192,204,946
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	50,689,205,000	105,353,876,000	19,756,910,908	0	19,756,910,908	18.75	85596965092
	JUMLAH BELANJA	125,393,806,000	231,347,990,000	95,462,609,011	2,534,320	95,460,074,691	41.26	135,887,915,309

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 30/10/20 11:57
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,594,534,000	1,710,560,448	0	1,710,560,448	65.93	883,973,552
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	2,594,534,000	1,710,560,448	0	1,710,560,448	65.93	883,973,552
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	262,325,000	14,142,791	0	14,142,791	5.39	248,182,209
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	262,325,000	14,142,791	0	14,142,791	5.39	248,182,209
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	16,000,000	3,450,000	0	3,450,000	21.56	12,550,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	16,000,000	3,450,000	0	3,450,000	21.56	12,550,000
5231	Belanja Pemeliharaan							
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	50,000,000	49,275,000	0	49,275,000	98.55	725,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	0	50,000,000	49,275,000	0	49,275,000	98.55	725,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	2,936,859,000	1,777,428,239	0	1,777,428,239	60.52	1159430761
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	46,970,000	46,970,000	0	46,970,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	46,970,000	46,970,000	0	46,970,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	46,970,000	46,970,000	0	46,970,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	0	2,983,829,000	1,824,398,239	0	1,824,398,239	61.14	1,159,430,761

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN
ESELON I

: 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
: 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 30/10/20 11:56
Halaman : 1
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,086,217,231	2,209,188,351	(1,122,971,120)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,086,217,231	2,209,188,351	(1,122,971,120)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,086,217,231	2,209,188,351	(1,122,971,120)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	22,683,898,811	21,570,057,167	1,113,841,644	-
Beban Persediaan	1,012,021,863	781,326,685	230,695,178	-
Beban Barang dan Jasa	40,794,497,503	43,885,835,098	(3,091,337,595)	-
Beban Pemeliharaan	5,803,616,775	2,330,191,053	3,473,425,722	-
Beban Perjalanan Dinas	6,085,524,809	18,487,973,447	(12,402,448,638)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN
ESELON I

: 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
: 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 30/10/20 11:56
Halaman : 2
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,523,225,715	6,536,959,310	(13,733,595)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	82,902,785,476	93,592,342,760	(10,689,557,284)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(81,816,568,245)	(91,383,154,409)	9,566,586,164	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	230,559,121	0	230,559,121	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	230,559,121	0	230,559,121	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	339,861,976	213,746,191	126,115,785	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	362,767,276	505,810,547	(143,043,271)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	22,905,300	292,064,356	(269,159,056)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	570,421,097	213,746,191	356,674,906	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(81,246,147,148)	(91,169,408,218)	9,923,261,070	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(81,246,147,148)	(91,169,408,218)	9,923,261,070	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : Lpe.es1
Tanggal : 30/10/20
11:56
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_es1

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,230,994,765,415	961,490,164,380	269,504,601,035	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(81,246,147,148)	(91,169,408,218)	9,923,261,070	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	119,713,996,144	413,875,976,950	(294,161,980,806)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	38,467,848,996	322,706,568,732	(284,238,719,736)	-
EKUITAS AKHIR	1,269,462,614,411	1,284,196,733,112	(14,734,118,701)	-

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020
 TAHUN ANGGARAN 2020

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UAPPB- : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA

Tanggal : 30/10/20 11:58 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_es

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	515,882,359
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	156,989,800
131111	Tanah	1,088,664,563,800
132111	Peralatan dan Mesin	62,442,737,010
133111	Gedung dan Bangunan	157,982,322,218
134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693
134112	Irigasi	831,972,000
134113	Jaringan	1,178,766,300
135111	Aset Tetap Renovasi	112,709,054
135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	12,497,217,562
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(44,395,335,558)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(17,248,485,533)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1,699,810,354)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(59,426,574)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(850,472,550)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,537,500,000)
162151	Software	812,483,190
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	50,593,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	11,500,405,790
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(11,178,702,853)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(729,061,315)
J U M L A H		1,269,405,398,536

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 30/10/20 11:58 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	160,933	1,072,226,368,000	40,000	16,438,195,800	0	0	200,933	1,088,664,563,800
20101	TANAH PERSIL	160,933	1,072,226,368,000	40,000	16,438,195,800	0	0	200,933	1,088,664,563,800
132111	Peralatan dan Mesin	8,559	52,360,266,470	1,204	10,162,244,290	24	79,773,750	9,739	62,442,737,010
30101	ALAT BESAR DARAT	1	63,500,000	0	0	0	0	1	63,500,000
30103	ALAT BANTU	27	209,029,220	1	43,450,000	0	0	28	252,479,220
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	56	7,597,427,500	8	1,438,850,000	0	0	64	9,036,277,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	5,800,000	10	34,573,000	0	0	12	40,373,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	6	58,000,000	0	0	0	0	6	58,000,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	15,410,000	5	8,373,005	0	0	6	23,783,005
30501	ALAT KANTOR	1,024	5,199,355,386	181	2,081,818,740	5	16,745,000	1,200	7,264,429,126
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,579	16,767,333,555	593	2,239,601,395	19	63,028,750	6,153	18,943,906,200
30601	ALAT STUDIO	171	5,678,779,660	5	46,676,600	0	0	176	5,725,456,260
30602	ALAT KOMUNIKASI	163	1,176,895,685	2	9,528,000	0	0	165	1,186,423,685
30603	PERALATAN PEMANCAR	22	230,168,800	0	0	0	0	22	230,168,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	333	895,905,000	17	62,088,500	0	0	350	957,993,500
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	12,306,000	0	0	0	0	1	12,306,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	39	515,232,500	0	0	0	0	39	515,232,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	51	546,704,700	0	0	0	0	51	546,704,700
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
31001	KOMPUTER UNIT	648	9,280,049,929	269	3,687,978,696	0	0	917	12,968,028,625
31002	PERALATAN KOMPUTER	347	2,583,969,635	112	497,316,354	0	0	459	3,081,285,989
31301	SUMUR	8	117,197,000	0	0	0	0	8	117,197,000
31503	ALAT SAR	2	13,200,000	0	0	0	0	2	13,200,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	9	239,132,000	0	0	0	0	9	239,132,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	36,750,000	0	0	0	0	1	36,750,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	32	174,434,000	1	11,990,000	0	0	33	186,424,000
133111	Gedung dan Bangunan	55	149,797,879,335	4	8,184,442,883	0	0	59	157,982,322,218
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28	93,939,929,927	4	8,154,543,895	0	0	32	102,094,473,822
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	25	54,029,736,510	0	29,898,988	0	0	25	54,059,635,498
40401	TUGU/TANDA BATAS	2	1,828,212,898	0	0	0	0	2	1,828,212,898
134111	Jalan dan Jembatan	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
50101	JALAN	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 30/10/20 11:58 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134112	Irigasi	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan	5	1,178,766,300	0	0	0	0	5	1,178,766,300
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	1	112,709,054	0	0	1	112,709,054
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	1	112,709,054	0	0	1	112,709,054
135121	Aset Tetap Lainnya	9,043	2,972,643,997	0	0	0	0	9,043	2,972,643,997
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	335	1,537,500,000	0	0	0	0	335	1,537,500,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,717	11,500,405,790	0	0	0	0	1,717	11,500,405,790
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	21	2,497,843,646	0	0	0	0	21	2,497,843,646
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	334	2,939,343,682	0	0	0	0	334	2,939,343,682
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,071	2,130,857,878	0	0	0	0	1,071	2,130,857,878
30601	ALAT STUDIO	11	12,957,650	0	0	0	0	11	12,957,650
30602	ALAT KOMUNIKASI	12	36,818,500	0	0	0	0	12	36,818,500
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	162,000	0	0	0	0	2	162,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	104,263,500	0	0	0	0	1	104,263,500
31001	KOMPUTER UNIT	172	2,495,178,824	0	0	0	0	172	2,495,178,824
31002	PERALATAN KOMPUTER	20	278,628,882	0	0	0	0	20	278,628,882
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	18,635,000	0	0	0	0	1	18,635,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012
TOTAL			1,298,253,208,585		34,897,592,027		79,773,750		1,333,071,026,862

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 30/10/20 11:58 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	160,933	1,072,226,368,000	40,000	16,438,195,800	0	0	200,933	1,088,664,563,800
20101	TANAH PERSIL	160,933	1,072,226,368,000	40,000	16,438,195,800	0	0	200,933	1,088,664,563,800
132111	Peralatan dan Mesin	11,635	53,163,272,059	1,615	10,371,157,090	24	79,773,750	13,226	63,454,655,399
30101	ALAT BESAR DARAT	1	63,500,000	0	0	0	0	1	63,500,000
30103	ALAT BANTU	27	209,029,220	1	43,450,000	0	0	28	252,479,220
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	56	7,597,427,500	8	1,438,850,000	0	0	64	9,036,277,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	5,800,000	10	34,573,000	0	0	12	40,373,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	6	58,000,000	0	0	0	0	6	58,000,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	125,000	0	0	0	0	1	125,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	15,410,000	6	9,073,005	0	0	7	24,483,005
30501	ALAT KANTOR	1,775	5,322,817,136	182	2,082,718,740	5	16,745,000	1,952	7,388,790,876
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7,776	17,411,985,646	930	2,400,371,695	19	63,028,750	8,687	19,749,328,591
30601	ALAT STUDIO	183	5,680,893,908	42	79,556,600	0	0	225	5,760,450,508
30602	ALAT KOMUNIKASI	165	1,177,195,685	35	22,990,500	0	0	200	1,200,186,185
30603	PERALATAN PEMANCAR	22	230,168,800	0	0	0	0	22	230,168,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	355	909,987,500	17	62,088,500	0	0	372	972,076,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	12,306,000	2	200,000	0	0	3	12,506,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	39	515,232,500	0	0	0	0	39	515,232,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	51	546,704,700	0	0	0	0	51	546,704,700
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
31001	KOMPUTER UNIT	648	9,280,049,929	269	3,687,978,696	0	0	917	12,968,028,625
31002	PERALATAN KOMPUTER	347	2,583,969,635	112	497,316,354	0	0	459	3,081,285,989
31301	SUMUR	8	117,197,000	0	0	0	0	8	117,197,000
31503	ALAT SAR	2	13,200,000	0	0	0	0	2	13,200,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	9	239,132,000	0	0	0	0	9	239,132,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	81	52,670,000	0	0	0	0	81	52,670,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	43	176,784,000	1	11,990,000	0	0	44	188,774,000
133111	Gedung dan Bangunan	55	149,797,879,335	4	8,184,442,883	0	0	59	157,982,322,218
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28	93,939,929,927	4	8,154,543,895	0	0	32	102,094,473,822
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	25	54,029,736,510	0	29,898,988	0	0	25	54,059,635,498
40401	TUGU/TANDA BATAS	2	1,828,212,898	0	0	0	0	2	1,828,212,898
134111	Jalan dan Jembatan	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 30/10/20 11:58 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 30 SEPTEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50101	JALAN	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
134112	Irigasi	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan	5	1,178,766,300	0	0	0	0	5	1,178,766,300
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	1	112,709,054	0	0	1	112,709,054
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	1	112,709,054	0	0	1	112,709,054
135121	Aset Tetap Lainnya	9,043	2,972,643,997	0	0	0	0	9,043	2,972,643,997
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	335	1,537,500,000	0	0	0	0	335	1,537,500,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,728	11,500,630,800	0	0	0	0	1,728	11,500,630,800
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	21	2,497,843,646	0	0	0	0	21	2,497,843,646
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	334	2,939,343,682	0	0	0	0	334	2,939,343,682
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,072	2,131,082,878	0	0	0	0	1,072	2,131,082,878
30601	ALAT STUDIO	11	12,957,650	0	0	0	0	11	12,957,650
30602	ALAT KOMUNIKASI	22	36,818,510	0	0	0	0	22	36,818,510
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	162,000	0	0	0	0	2	162,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	104,263,500	0	0	0	0	1	104,263,500
31001	KOMPUTER UNIT	172	2,495,178,824	0	0	0	0	172	2,495,178,824
31002	PERALATAN KOMPUTER	20	278,628,882	0	0	0	0	20	278,628,882
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	18,635,000	0	0	0	0	1	18,635,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012
TOTAL			1,299,056,439,184		35,106,504,827		79,773,750		1,334,083,170,261

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
 ASET TAK BERWUJUD
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 30/10/20 11:58 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_atb_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO S.D 30 SEPTEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	72	780,983,190	1	31,500,000	0	0	73	812,483,190
80101	ASET TAK BERWUJUD	72	780,983,190	1	31,500,000	0	0	73	812,483,190
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	50,593,500	0	0	0	0	1	50,593,500
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	50,593,500	0	0	0	0	1	50,593,500
TOTAL			831,576,690		31,500,000		0		863,076,690

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

UAPB : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tanggal : 30/10/20 11:59 PM

UAPPB-E1 : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 SEPTEMBER 2020						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		73	812,483,190	706,576,940	22,484,375	0	729,061,315	83,421,875
80101	ASET TAK BERWUJUD		73	812,483,190	706,576,940	22,484,375	0	729,061,315	83,421,875
JUMLAH			73	812,483,190	706,576,940	22,484,375	0	729,061,315	83,421,875